

Corporate Governance dan Agresivitas Pajak: Peran Moderasi Koneksi Politik Pada Perusahaan Pertambangan di BEI

Sandra Sashadila^{1*}, Khristina Yunita², Juanda Astarani³

^{1,2,3} Universitas Tanjungpura, Indonesia

* E-mail: b1031231048@student.untan.ac.id

Information Article

History Article

Submission: 14-06-2026

Revision: 25-06-2026

Published: 28-07-2026

DOI Article:

10.62421/jibema.v4i1.374

ABSTRAK

Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi atau strategi yang berpotensi melanggar ketentuan pajak. Situasi ini mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi suboptimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh komisaris independen terhadap *agresivitas* pajak dan peran koneksi politik sebagai variabel moderasi pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan. Pengambilan sampel purposif digunakan untuk memperoleh 87 observasi dari 29 perusahaan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan pendekatan *Moderated Regression Analysis* (MRA) menggunakan *EViews 12*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak, yang mengindikasikan bahwa kehadiran mereka dapat meningkatkan efektivitas pengawasan kebijakan pajak perusahaan. Sementara itu, koneksi politik tidak memoderasi hubungan antara komisaris independen dan agresivitas pajak.

Kata Kunci: Komisaris Independen, Koneksi Politik, Agresivitas Pajak, Corporate Governance, Perusahaan Pertambangan

ABSTRACT

Tax aggressiveness is a company's attempt to minimize tax liabilities by exploiting regulatory loopholes or strategies that potentially violate tax provisions. This situation results in suboptimal state revenue from the tax sector. The purpose of this study is to analyze the influence of independent commissioners on tax aggressiveness and the role of political connections as a moderating variable in mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2022–2024 period. This study uses secondary data obtained from the companies' annual financial reports. Purposive sampling was used to obtain 87 observations from 29 companies. Data analysis was performed using panel data regression with a Moderated Regression Analysis (MRA) approach using EViews 12. The results show that independent commissioners have a negative influence on tax aggressiveness, indicating that their presence can increase the effectiveness of corporate tax policy oversight. Meanwhile, political connections do not moderate the relationship between independent commissioners and tax aggressiveness.

Key word: Independent Commissioners, Political Connections, Tax Aggressiveness, Corporate Governance, Mining Companies

Acknowledgment

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan instrumen penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan nasional, termasuk di sektor pertambangan, yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Namun, dalam praktiknya, beberapa perusahaan masih berupaya mengurangi beban pajak mereka lewat agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan upaya perusahaan untuk meminimalkan kewajiban pajak dengan memanfaatkan celah regulasi atau strategi yang berpotensi melanggar ketentuan pajak (Cahya & Nursita, 2023). Situasi ini mengakibatkan penerimaan negara dari sektor pajak menjadi suboptimal. Sektor pertambangan memiliki nilai strategis yang tinggi karena kontribusinya yang signifikan terhadap penerimaan negara dan pemanfaatan sumber daya alam nasional.

Fenomena agresivitas pajak di perusahaan pertambangan menjadi perhatian karena sektor ini memiliki profitabilitas yang tinggi, tetapi kontribusi pajaknya tidak selalu sejalan dengan peningkatan keuntungan perusahaan. Penerimaan pajak dari sektor pertambangan juga berfluktuasi dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, perusahaan dengan keuntungan tinggi masih menghadapi pembayaran pajak yang relatif rendah. Situasi ini menunjukkan praktik manajemen pajak yang agresif, yang membutuhkan pengawasan perusahaan yang lebih efektif. Fenomena agresivitas pajak juga menarik perhatian global karena praktik tersebut dapat mengurangi pendapatan negara dan berdampak pada transparansi perusahaan, khususnya di sektor-sektor dengan profitabilitas tinggi (Isdianawati Fisher, 2025). Penelitian (Damayanti, Awaliah, 2022) menunjukkan bahwa *Effective Tax Rate* (ETR) yang rendah dapat menjadi indikasi praktik agresivitas pajak perusahaan.

Salah satu faktor yang diyakini berpengaruh terhadap agresivitas pajak adalah *corporate governance*. Penerapan *corporate governance* yang baik diharapkan dapat memperkuat aspek transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang lebih efektif dalam setiap pengambilan keputusan perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan. Dalam penelitian ini, *corporate governance* diwakili oleh komisar independen. Keberadaan komisar independen dianggap penting karena mereka memiliki fungsi pengawasan terhadap kebijakan manajemen untuk memastikan perusahaan terus beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip *corporate governance* yang baik, termasuk implementasi kewajiban pajak perusahaan. Penelitian sebelumnya tentang pengaruh komisar independen terhadap agresivitas pajak telah menghasilkan temuan yang beragam. Penelitian (Nailufar et al., 2024) menunjukkan bahwa komisar independen memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Di sisi lain, beberapa studi sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen tidak selalu memengaruhi tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan (Astika & Asalam, 2023). Perbedaan temuan tersebut mengindikasikan bahwa praktik agresivitas pajak dapat dipengaruhi oleh beragam kondisi serta karakteristik internal perusahaan, sehingga perlu dilakukan kajian yang lebih mendalam untuk memahaminya secara komprehensif. Selain *corporate governance*, koneksi politik juga diduga memengaruhi agresivitas pajak perusahaan (Mawarni & Purwaningsih, 2025). Koneksi politik terjadi ketika suatu perusahaan memiliki hubungan dengan pejabat pemerintah atau individu yang memiliki pengaruh politik. Hubungan ini dapat memberikan perusahaan akses dan manfaat tertentu, termasuk dalam pembuatan kebijakan strategis. Situasi ini menunjukkan bahwa koneksi politik dapat memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan internal perusahaan, khususnya terkait kebijakan pajak. Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan reformasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak badan, termasuk pada sektor pertambangan. Reformasi tersebut dilakukan lewat penguatan regulasi perpajakan, digitalisasi administrasi pajak, serta peningkatan pengawasan terhadap perusahaan dengan risiko agresivitas pajak yang tinggi.

Sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang memperoleh perhatian khusus karena memiliki karakteristik operasional yang kompleks dan nilai transaksi yang besar. Oleh karena itu, praktik agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan menjadi isu yang penting untuk diteliti, terutama terkait efektivitas mekanisme *corporate governance* dalam mengawasi kebijakan perpajakan perusahaan. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini meneliti hubungan antara *corporate governance* dan agresivitas pajak di sektor pertambangan untuk tahun 2022–2024 dengan menggunakan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada perusahaan tambang yang memiliki karakteristik operasional kompleks serta tingkat pengawasan pajak yang tinggi. Berdasarkan fenomena dan *research gap* tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran koneksi politik sebagai variabel moderasi pada perusahaan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024, serta pengaruh *corporate governance* yang diukur melalui komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan desain asosiatif untuk menguji hubungan antara *corporate governance* dan agresivitas pajak, dengan koneksi politik sebagai variabel moderasi. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data yang dianalisis bersifat numerik dan diolah menggunakan teknik statistik untuk pengujian hipotesis penelitian. Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (*IDX*) pada periode 2022–2024. Sektor pertambangan dipilih karena merupakan salah satu sektor

strategis dengan kontribusi signifikan terhadap konsumsi nasional, terutama dalam konsumsi pajak. Selain itu, bisnis pertambangan memiliki struktur biaya dan karakteristik operasional yang kompleks sehingga rentan terhadap praktik pajak yang agresif. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang melibatkan pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian. Namun, kriteria sampel tersebut meliputi: (1) perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2022–2024; (2) perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan komprehensif selama periode penelitian; dan (3) perusahaan yang tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Berdasarkan proses pemilihan sampel, sekitar 29 perusahaan yang memenuhi kriteria penelitian dengan total 87 observasi selama periode 2022–2024 dipilih.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak *EViews 12*. Metode data panel digunakan karena mampu mengamati perubahan data dari waktu ke waktu dan membandingkan karakteristik antar perusahaan dalam periode yang sama. Tahapan analisis data dalam penelitian ini mencakup statistik deskriptif, uji asumsi klasik, penentuan model regresi data panel, serta pengujian hipotesis. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data melalui nilai rata-rata, nilai minimum, nilai maksimum, dan standar deviasi. Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Selanjutnya, pemilihan model regresi data panel dilakukan dengan Uji *Chow*, Uji *Hausman*, dan Uji *Lagrange Multiplier* (LM) guna menentukan model yang paling tepat antara *Common Effect Model* (CEM), *Fixed Effect Model* (FEM), dan *Random Effect Model* (REM). Selanjutnya, pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji *t* dan Analisis Regresi Moderasi (MRA) untuk menganalisis peran koneksi politik dalam memoderasi hubungan antara *corporate governance* dan agresivitas pajak.

Hipotesis

H1: Komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

H2: Koneksi politik memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Statistik Deskriptif

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	X	Y	Z	X*Z
<i>Mean</i>	0.570307	-0.333387	0.505747	0.240421
<i>Median</i>	0.500000	-0.511334	1.000000	0.250000
<i>Maximum</i>	1.000000	1.405298	1.000000	1.000000
<i>Minimum</i>	0.200000	-2.803055	0.000000	0.000000
<i>Std. Dev</i>	0.272862	1.009394	0.502865	0.289632
<i>Observation</i>	87	87	87	87

Sumber: *Output EViews 12*, data diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 2, variabel komisaris independen (X) menunjukkan nilai rata-rata 0.570307 dengan median 0.500000. Nilai tertinggi 1.000000 dan nilai terendah 0.200000 menunjukkan variasi proporsi komisaris independen di perusahaan sampel selama periode penelitian. Deviasi standar 0.272-862 menunjukkan bahwa distribusi data komisaris independen cenderung rendah. Variabel agresivitas pajak (Y) memiliki rata-rata -0.333287 dengan deviasi standar 1.009394. Nilai maksimum 1.405298 dan nilai minimum -2.803055 menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak di antara perusahaan pertambangan sangat bervariasi selama periode penelitian. Deviasi standar yang besar menunjukkan bahwa data agresivitas pajak memiliki tingkat distribusi yang relatif tinggi. Selanjutnya, variabel koneksi politik (Z) memperoleh nilai rata-rata 0.505747 dan median 1.000000.

Pengukuran variabel koneksi politik menggunakan variabel *dummy* ditunjukkan oleh nilai maksimum sebesar 1.000000 dan nilai minimum sebesar 0.000000, dengan pemberian nilai 1 pada perusahaan yang memiliki koneksi politik dan nilai 0 pada perusahaan yang tidak memilikinya. Berdasarkan nilai rata-rata tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel memiliki koneksi politik. Variabel interaksi antara komisaris independen dan koneksi politik (X*Z) memperoleh nilai rata-rata 0.240421 dengan standar deviasi 0.289632. Nilai maksimum 1.000000 dan nilai minimum 0.000000 menunjukkan perbedaan tingkat interaksi antara komisaris independen dan koneksi politik di perusahaan-perusahaan dalam sampel penelitian.

Uji Asumsi Klasik

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	X	Z	Interaksi
X	1.000000	-0.353959	0.046221
Z	-0.353959	1.000000	0.825364
Interaksi	0.046221	0.825364	1.000000

Sumber: *Output EViews 12*, data diolah (2026)

Semua nilai korelasi antara variabel independen dan variabel interaksi kurang dari 0.90, menurut temuan uji multikolinearitas menggunakan matriks korelasi. Asosiasi antara hubungan politik dan variabel interaksi memiliki nilai korelasi terbesar 0.825364. Dapat disimpulkan bahwa asosiasi antara variabel independen tidak cukup kuat untuk menghasilkan gejala multikolinearitas karena nilai ini masih di bawah batas umum multikolinearitas. Oleh karena itu, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap sesuai untuk digunakan dalam pengujian hipotesis.

Uji Heteroskedastisitas

Metode *Breusch-Pagan-Godfrey* menguji heteroskedastisitas, menghasilkan nilai probabilitas 0.2710, lebih besar dari 0.05. Nilai ini menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroske-

dastisitas, sehingga menghasilkan distribusi residual yang konstan. Dalam kondisi ini, model regresi dianggap memenuhi asumsi klasik dan dapat digunakan pada tahap analisis selanjutnya. Penggunaan regresi data panel dalam penelitian ini dianggap lebih efektif karena menggabungkan data deret waktu dan data lintas bagian dalam satu model analisis. Selain itu, pendekatan data panel dapat meminimalkan potensi bias yang timbul dari perbedaan karakteristik antar perusahaan.

Analisis Regresi Data Panel

Dalam penelitian ini, model regresi data panel dipilih menggunakan uji *Chow*, *Hausman*, dan *Lagrange Multiplier* (LM). *Fixed Effect Model* (FEM) dipilih karena temuan Uji *Chow* menunjukkan nilai probabilitas *Chi-square cross-section* sebesar $0.0000 < 0.05$. Selain itu, Uji *Hausman* menghasilkan nilai probabilitas $0.2218 > 0.05$, yang menunjukkan bahwa *Random Effect Model* (REM) merupakan pilihan yang lebih baik daripada FEM. Lebih lanjut, Uji *Lagrange Multiplier* menghasilkan nilai probabilitas *Breusch-Pagan* sebesar $0.0013 < 0.05$, yang menunjukkan bahwa REM merupakan pilihan yang lebih baik daripada *Common Effect Model* (CEM). Oleh karena itu, *Random Effect Model* (REM) adalah model regresi data panel yang digunakan dalam penelitian ini.

Tabel 4. Uji Chow

<i>Effect Test</i>	<i>Statistic</i>	<i>d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section F</i>	2.902588	(28.55)	0.0004
<i>Cross-section Chi-square</i>	78.937107	28	0.0000

Sumber: *Output EViews 12*, data diolah (2026)

Tabel 5. Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Chi-Sq. Statistic</i>	<i>Chi-Sq. d.f</i>	<i>Prob.</i>
<i>Cross-section Random</i>	4.395380	3	0.2218

Sumber: *Output EViews 12*, data diolah (2026)

Tabel 6. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	<i>Test Hypothesis</i>		
	<i>Cross-section</i>	<i>Time</i>	<i>Both</i>
<i>Breusch-Pagan</i>	10.29828	0.030281	10.328556
<i>Prob</i>	(0.0013)	(0.8619)	(0.0013)

Sumber: *Output Eviews 12*, data diolah (2026)

Tabel 7. Uji Hipotesis

	<i>Koefisien</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob</i>
<i>C</i>	0.652024	0.490040	1.330551	0.1870
<i>X</i>	-1.468704	0.659908	-2.225619	0.0288
<i>Z</i>	-1.002927	0.639183	-1.569076	0.1204
<i>Interaksi</i>	1.495409	0.969006	1.543240	0.1266

	<i>Koefisien</i>	<i>Std. Error</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob</i>
<i>R-squared</i>	0.632374			
<i>Adjusted R2</i>	0.425167			
<i>Prob (F-statistic)</i>	0.000149			

Sumber: *Output EViews 12*, data diolah (2026)

Uji Simultan (Uji F)

Nilai *Prob(F-statistik)* adalah 0.000149 berdasarkan temuan uji simultan pada Tabel 7. Nilai ini kurang dari 0.05, menunjukkan bahwa selama periode penelitian, agresivitas pajak perusahaan di industri pertambangan secara signifikan dipengaruhi oleh karakteristik *corporate governance*, koneksi politik, dan variabel interaksi secara simultan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil uji koefisien determinasi pada Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R-squared* adalah 0.425167, atau 42.51%. Angka ini menunjukkan bahwa *corporate governance*, koneksi politik, dan variabel interaksi menyumbang 42.51% dari variasi agresivitas pajak. Variabel *eksternal* dan elemen lain yang tidak termasuk dalam model penelitian ini memengaruhi fraksi yang tersisa.

Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil pengujian parsial pada Tabel 7, variabel komisaris independen memiliki dampak negatif dan substansial terhadap agresivitas pajak, dengan nilai *probabilitas* 0.0288. Temuan ini menunjukkan bahwa kecenderungan perusahaan untuk terlibat dalam agresivitas pajak menurun seiring dengan meningkatnya persentase komisaris independen. Variabel koneksi politik, di sisi lain, tidak memiliki dampak yang terlihat terhadap agresivitas pajak, dengan nilai probabilitas 0.1204. Koneksi politik tidak mampu mengurangi hubungan antara *corporate governance* dan agresivitas pajak, menurut variabel interaksi antara *corporate governance* dan koneksi politik, yang memiliki nilai *probabilitas* 0.1266.

PEMBAHASAN

Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diukur melalui komisaris independen memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen dalam perusahaan akan diikuti oleh penurunan kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik agresivitas pajak (Nugraha & Haryati, 2024). Kehadiran komisaris independen dianggap dapat meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan kebijakan manajemen, termasuk membuat keputusan pajak perusahaan lebih transparan

dan akuntabel. Berdasarkan teori agensi, komisaris independen memainkan peran penting dalam meminimalkan konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajemen secara inheren cenderung meningkatkan keuntungan perusahaan melalui berbagai strategi efisiensi, termasuk kebijakan pajak yang agresif. Namun, kehadiran komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk lebih berhati-hati dalam menerapkan kebijakan pajak dan menjaga kepatuhan terhadap peraturan pajak yang berlaku (Mahouat et al., 2025). Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko sanksi pajak, audit pajak, dan potensi kerusakan reputasi perusahaan di mata investor, pemerintah, dan masyarakat luas.

Di sektor pertambangan, peran komisaris independen menjadi semakin penting karena karakteristik operasional perusahaan pertambangan yang kompleks dan tingkat pengawasan pemerintah yang relatif tinggi. Perusahaan pertambangan umumnya memiliki aset besar, aktivitas ekspor, dan transaksi operasional yang kompleks, yang berpotensi menyebabkan praktik pajak yang agresif. Selain kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian nasional, sektor pertambangan juga merupakan sumber pendapatan negara melalui pajak dan royalti. Situasi ini telah mendorong pemerintah dan otoritas pajak untuk lebih memperhatikan tingkat kepatuhan pajak di perusahaan pertambangan. Kehadiran komisaris independen dianggap mampu meningkatkan kualitas pengawasan kebijakan manajemen, khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pajak perusahaan. Selain itu, komisaris independen membantu menegakkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan, yang mendorong bisnis untuk mengadopsi strategi pajak berisiko tinggi dengan lebih hati-hati. Oleh karena itu, agresivitas pajak perusahaan menurun dengan implementasi *corporate governance* yang lebih sukses melalui komisaris independen. Teori agensi, yang menjelaskan bagaimana prosedur pengawasan perusahaan dapat mengurangi perilaku manajerial oportunistik dalam pengambilan keputusan perusahaan, didukung oleh temuan penelitian ini.

Temuan studi ini juga sejalan dengan beberapa studi sebelumnya yang menunjukkan bahwa *corporate governance* melalui kehadiran komisaris independen dapat menekan praktik penghindaran pajak perusahaan yang agresif. Lebih lanjut, komisaris independen dapat meningkatkan kualitas *corporate governance* melalui pengawasan yang lebih objektif terhadap aktivitas manajemen perusahaan. Komisaris independen memegang posisi yang relatif bebas dari kepentingan internal perusahaan dan oleh karena itu dianggap lebih independen dalam mengawasi kebijakan strategis perusahaan. Pengawasan yang efektif dapat mendorong perusahaan untuk lebih patuh terhadap peraturan pajak dan menghindari kebijakan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum di masa depan. Di perusahaan pertambangan, pengawasan yang efektif bahkan lebih penting karena tingginya tingkat risiko operasional dan pengawasan regulasi di sektor ini. Oleh karena itu, perusahaan cenderung mempertimbangkan aspek kepatuhan dan reputasi ketika menentukan kebijakan pajak yang

berkelanjutan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* tetap menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pengawasan perusahaan di Indonesia. Komisaris independen tidak hanya melengkapi struktur organisasi perusahaan tetapi juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa kebijakan perusahaan tetap selaras dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan *corporate governance* yang baik. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen dapat berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal bagi perusahaan untuk mengekang praktik penghindaran pajak yang agresif dan secara konsisten serta berkelanjutan meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Koneksi Politik dalam Memoderasi Hubungan *Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Temuan penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara *corporate governance* dan agresivitas pajak tidak dimoderasi oleh koneksi politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan pertambangan tidak diperkuat atau dilemahkan oleh adanya koneksi politik. Secara teori, perusahaan dengan koneksi politik dikatakan memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi, perlindungan politik, dan peraturan yang dapat digunakan untuk keuntungan mereka, seperti undang-undang pajak. Akan tetapi, temuan penelitian ini mengindikasikan bahwa koneksi politik tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hubungan antara *corporate governance* dan agresivitas pajak perusahaan. Situasi ini mungkin muncul karena industri pertambangan sangat diatur oleh pemerintah, masyarakat umum, dan otoritas pajak. Karena perusahaan pertambangan terkait erat dengan pengelolaan sumber daya alam, operasi mereka biasanya menerima pengawasan yang lebih ketat daripada industri lain. Karena risiko hukum dan reputasi yang relatif tinggi yang mereka hadapi, bisnis dengan koneksi politik tetap harus menetapkan prosedur pajak yang sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

Selain itu, meningkatnya pengawasan pemerintah terhadap praktik perpajakan perusahaan pertambangan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam melakukan praktik agresivitas pajak. Dalam kondisi tersebut, fungsi pengawasan komisaris independen tetap lebih dominan dibandingkan pengaruh koneksi politik perusahaan. Artinya, keberadaan koneksi politik tidak cukup kuat untuk mengubah efektivitas *corporate governance* dalam menekan praktik agresivitas pajak. Hasil Penelitian ini juga menunjukkan bahwa implementasi *corporate governance* di berbagai perusahaan tidak selalu berhasil, bahkan ketika perusahaan tersebut memiliki koneksi politik. Komisaris independen tetap menjalankan fungsi pengawasan secara profesional karena perusahaan pertambangan menghadapi tekanan yang besar untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi serta mempertahankan legitimasi perusahaan di mata publik.

Oleh karena itu, koneksi politik tampaknya tidak memengaruhi bagaimana *corporate governance* memengaruhi agresivitas pajak di perusahaan pertambangan Indonesia. Lebih lanjut, temuan penelitian menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk memengaruhi kebijakan pajak tidak selalu meningkat seiring dengan koneksi politik. Meskipun demikian, perusahaan dengan koneksi politik perlu mempertimbangkan kemungkinan pengawasan publik dan pemerintah jika mereka dicurigai terlibat dalam perilaku agresif pajak. Hal ini menunjukkan bahwa untuk menjaga reputasi mereka dan memastikan keberlangsungan bisnis jangka panjang mereka, perusahaan pertambangan biasanya lebih memperhatikan kepatuhan pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, koneksi politik memiliki sedikit pengaruh terhadap efektivitas pengawasan komisaris independen terhadap kebijakan pajak perusahaan.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate governance* yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh negatif dan signifikan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2-24. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka kecenderungan perusahaan melakukan praktik agresivitas pajak semakin rendah. Sementara itu, koneksi politik tidak mampu memoderasi hubungan antara komisaris independen dan agresivitas pajak, sehingga efektivitas fungsi pengawasan komisaris independen tetap berjalan terlepas dari adanya hubungan politik perusahaan.

Berdasarkan hasil penelitian, perusahaan disarankan untuk terus meningkatkan efektivitas peran komisaris independen sebagai bagian dari penerapan *corporate governance* yang baik guna mendorong kepatuhan pajak. Penelitian ini masih terbatas pada sektor pertambangan, periode pengamatan yang relatif singkat, serta penggunaan komisaris independen dan koneksi politik sebagai variabel penelitian. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan memperluas cakupan sektor dan periode penelitian, serta menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi agresivitas pajak agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal, & Adiwibowo. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Dan Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2021). *Diponegoro Journal of Accounting*, 12(4), 1–13.
- Amelia, & Vika. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Financial Distress, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak dengan Political Connection Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Humaniora*, 10(1), 50–57. <https://doi.org/10.33795/jabh.v8i1.22>

- Apriyadi, & Syahputra. (2024). Pengaruh Komisaris Independen, Intensitas Modal dan Sales Growth terhadap Agresivitas Pajak: Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2022. *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Ekonomi & Bisnis*, 4(2), 439–452. <https://doi.org/10.37481/jmeb.v4i2.737>
- Astika, & Asalam. (2023). Pengaruh Corporate Governance dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekombis Review*, 11(1), 96–103.
- Bernhard, & Veny. (2023). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 15(2), 20–31. <https://doi.org/10.55049/jeb.v15i2.219>
- Cahya, & Nursita. (2023). Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas dan Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 270–278. <https://doi.org/10.54259/akua.v2i4.1941>
- Damayanti, Awaliah, U. (2022). Tren penghindaran pajak perusahaan di Indonesia yang terdaftar di BEI melalui analisis effective tax rate perusahaan. *Akrual: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Kontemporer*, 15(1), 1–11. www.idx.co.id
- Eka, L., Yudhanti, & Arep. (2024). Factors That Affect Tax Aggressiveness With Good Corporate Governance As A Moderating Variable. *Journal of Accounting Science*, 8(2), 139–163. <https://doi.org/10.21070/jas.v8i2.1871>
- Fadillah, & Lingga. (2021). Pengaruh Transfer Pricing Dan Gcg Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei. *Jurnal Akuntansi*, 13(November), 332–343.
- Febriana, & Pratiwi. (2023). Agresivitas Pajak : Manajemen Laba, Komisaris Independen, dan Intensitas Persediaan. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(2), 424–437. <https://doi.org/10.33059/jensi.v7i2.8428>
- Isdianawati Fisher. (2025). Profitability, Leverage, Corporate Social Responsibility, and Institutional Ownership: Determinants of Tax Aggressiveness in the Indonesian Capital Market, 2020–2023. *E-Jurnal Akuntansi*, 35(7), 2020–2023. <https://doi.org/10.24843/eja.2025.v35.i07.p15>
- Jensen, C., & Meckling, H. (1976). *THEORY OF THE FIRM : MANAGERIAL BEHAVIOR , AGENCY COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE I . Introduction and summary In this paper WC draw on recent progress in the theory of (1) property rights , firm . In addition to tying together elements of the theory of e. 3*, 305–360.
- Mahouat, Azenzoul, Slimane, N., Es-Sanoun, Mokhlis, & Jbene, M. (2025). Corporate Governance and Tax Aggressiveness: The Moderating Role of Audit Quality. *Journal of Risk and Financial Management*, 19(1), 10. <https://doi.org/10.3390/jrfm19010010>
- Mawarni, & Purwaningsih. (2025). Pengaruh Koneksi Politik, Corporate Social Responsibility, dan Good Corporate Governance terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023). *Rashid : Journal of Economic*, 1(2), 87–97. <https://doi.org/10.65065/tf663t37>
- Meldisthy, Espa, & Ikhsan. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ekobistek*, 13(2), 54–61. <https://doi.org/10.35134/ekobistek.v13i2.783>
- Nailufar, Hamidi, & Alfarisi, F. (2024). The Influence of Corporate Governance and Covid-19 on Tax Avoidance in Mining Companies Listed on The IDX From 2018 to 2023. *Journal of Accounting*

and Finance Management, 5(3), 364–376. <https://doi.org/10.38035/jafm.v5i3.710>

Nugraha, & Haryati. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Aktiva : Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), 138–151. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.246>

Pratama, & Amanah. (2024). *Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode 2019 – 2021*.

Setyastri, Subekti, & Prastiwi. (2021). Corporate governance and political connection towards the tax aggressiveness of manufacturing companies in Indonesia. *International Research Journal of Management, IT and Social Sciences*, 8(1), 102–109. <https://doi.org/10.21744/irjmis.v8n1.1118>

Solikin, & Slamet. (2022). *Pengaruh koneksi politik, kebijakan dividen*.

Sumingtio, & Ismanto. (2025). Exploring the Influence of Political Connections, Managerial Ownership, Capital Intensity and Company Size on Tax Aggressiveness. *Journal of Accounting, Management, and Economics Research (JAMER)*, 3(2), 84–97. <https://doi.org/10.33476/jamer.v3i2.230>